

---

## *Collaborative Governance Dalam Pendataan Sustainable Development Goals Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020*

---

**Irwan Eka Syafutra<sup>1</sup>, Kiki Endah<sup>2</sup>, Ii Sujai<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Galuh Ciamis

<sup>123</sup>(Jalan R. E. Martadinata, No. 150, Ciamis, Indonesia)

Penulis Korespondensi: [irwanekasyafutra10@gmail.com](mailto:irwanekasyafutra10@gmail.com)

Diterima (Received): 11 Juli 2023 • Direvisi (Revised): 03 Oktober 2023 • Disetujui Publikasi (Accepted): 02 November 2023

---

### **ABSTRACT**

---

*The background of this research is the implementation of Collaborative Governance in Data Collection on Sustainable Development Goals in Mulyasari Village, Jatinagara District, Ciamis Regency in 2020 which has not been optimal, this can be seen from the following problem indicators; There are still many people in Mulyasari Village who do not understand the Sustainable Development Goals (SDGs). There is a lack of information from the local village government regarding the Sustainable Development Goals (SDGs). In filling out the questionnaire, there is a lot of inaccurate data and some are filling it carelessly. Based on this background, the authors determine the formulation of the problem regarding how Collaborative Governance in Data Collection of Sustainable Development Goals Mulyasari Village, Jatinagara District, Ciamis Regency in 2020. The purpose of this research is to find out Collaborative Governance in Data Collection on Sustainable Development Goals, Mulyasari Village, Jatinagara District, Ciamis Regency in 2020. Methods the research used in this study, namely the Descriptive Qualitative Research method. Data collection techniques through observation, interviews, literature study. The number of informants in this study were 6 people. The data analysis technique uses an interactive analysis model with analysis steps starting from data collection, data reduction, data presentation to drawing conclusions. Based on the results of the research, it can be concluded that Collaborative Governance in Data Collection on Sustainable Development Goals in Mulyasari Village, Jatinagara District, Ciamis Regency in 2020 has not been optimal.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, SDGs, Village Government*

---

### **ABSTRAK**

---

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020 yang belum optimal, hal itu terlihat dari indikator permasalahan sebagai berikut; Masih banyaknya masyarakat Desa Mulyasari yang belum mengerti mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs), Kurangnya informasi dari pihak Pemerintah Desa setempat berkenaan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Dalam pengisian kuisioner banyak data yang kurang akurat dan ada juga yang mengisi secara asal-asalan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah mengenai Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara

Silahkan mengutip artikel ini sebagai: Syafutra, I. E., Endah, K., Sujai, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Pendataan Sustainable Development Goals Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVVS)*, 1(2), 113-125. <https://doi.org/10.0005/poligovs.v1i2.979>

Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode Penelitian Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan langkah analisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* Dalam Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020 belum optimal.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, *SDGs*, Pemerintah Desa

## PENDAHULUAN

Suatu sistem interaksi kooperatif yang dilakukan oleh banyak pihak umumnya digambarkan dengan istilah luas "*Collaborative Governance*", yang digunakan untuk mendefinisikannya. Menurut pendapat Edward DeSeve (Sudarmo, 2015) *collaborative governance* adalah "Sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas". *Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan "*non-state*" di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan public atau mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash, 2008).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang mendukung kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjamin keadilan, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sepanjang waktu. Hal ini melibatkan penerapan tata kelola yang dapat menjaga kualitas hidup tetap tinggi dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal. Karena itulah, indikator SDGs dapat diaplikasikan untuk mengukur realitas pembangunan, baik pada tingkat global, regional, nasional, daerah, bahkan ke tingkat desa. Secara eksplisit, tujuan SDGs dimaksudkan untuk memobilisasi pembangunan yang mengarah pada terjadinya kemajuan, khususnya dalam usaha mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan di manapun, mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengambil langkah strategis untuk perubahan iklim. (Iskandar, 2020:99).

SDGs sendiri merupakan komitmen internasional dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki 17 tujuan, antara lain : (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Desa adalah kumpulan bangunan yang terpisah dari kota atau merupakan wilayah yang menjadi tempat tinggal beberapa keluarga dan mempunyai pemerintahan sendiri

(dikepalai oleh seorang Kepala Desa). Atas prakarsa sendiri, penduduk tetap membuat desa dengan mempertimbangkan sejarah wilayah serta karakteristik bahasa, budaya, ekonomi, dan sosial politik penduduk setempat.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: Desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Juli 2017, Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang, Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia, untuk menjadi bagian dari aksi bersama masyarakat global dalam mendorong pembangunan berkelanjutan guna mengatasi kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, pendidikan, serta perubahan iklim. Perpres inilah yang menjadi pedoman konvergensi SDGs dengan rencana pembangunan nasional.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, “SDGs Desa merupakan upaya pembangunan desa terpadu untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masyarakat desa turut dilibatkan dalam kemajuan desa ketika kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan untuk mencapai SDGs Desa.

Tujuan SDGs menetapkan bahwa kemajuan tidak hanya berlangsung di berbagai sektor namun di semua bidang juga, sehingga penduduk Desa dapat mengalaminya. Hanya perencanaan pembangunan infrastruktur yang buruk dilakukan di Desa Mulyasari, dan beberapa pekerjaan pemeliharaan dilakukan pada infrastruktur dan fasilitas sosial dan kesehatan. Hanya ketika sumber daya manusia dikembangkan untuk memajukan masyarakat, pembangunan akan terlihat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI juga belum dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Mulyasari. Meskipun Kementerian Desa mengadvokasi untuk mencapai SDGs Desa, hal itu dilakukan agar selaras dengan tujuan SDGs Desa, memastikan bahwa pembangunan lain juga diprioritaskan selain SDGs Desa.

Masalah umum yang sering ditemui dalam pembangunan pedesaan adalah tidak adanya data yang akurat. Padahal, data yang tepat sangat dibutuhkan untuk ketepatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan desa masih jauh dari target yang diharapkan. Terutama pada empat pilar dalam membangun Desa (Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Tata kelola Pemerintahan), karena empat pilar tersebut menjadi target yang terintegrasi didalam mewujudkan SDGs Desa.

Masalah yang ditemukan dalam pengamatan penelitian ini, bahwa *Collaborative Governance* Dalam Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa Mulyasari Kecamatan

Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020 belum optimal, dimana dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

- 1) Masih banyaknya masyarakat Desa Mulyasari yang belum mengerti mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini dapat dilihat dari masyarakat setempat ketika dalam pendataan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- 2) Kurangnya informasi dari pihak Pemerintah Desa setempat berkenaan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini dapat dilihat dari masyarakat tidak mengetahui tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- 3) Dalam pengisian kuisioner banyak data yang kurang akurat dan ada juga yang mengisi secara asal-asalan. Hal ini terjadi karena ketidak pahaman mengenai tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dan tidak mengetahui seberapa penting nya perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa bagi kehidupan masyarakat desa.

*Collaborative Governance* yang baik, masyarakat, dan kemitraan dengan pihak ketiga lainnya diperlukan untuk mewujudkan SDGs Desa. Untuk mencapai keberhasilan tujuan pelaksanaan *Collaborative Governance* tersebut diperlukan beberapa instrument yang mendukungnya, seperti menurut Schottle, Haghsheno dan Gehbauer yang dikutip oleh Hardi, W. (2020:89) “Faktor kuat yang paling mempengaruhi *Collaborative* terdiri dari kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan bersama dalam mengambil risiko”.

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membandingkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini sehingga penulis dapat menentukan langkah apa yang harus penulis lakukan untuk menyelesaikan penelitian yang sedang diteliti. Adapun penelitian terdahulu penulis mengambil dari beberapa jurnal dan skripsi sebagai berikut :

- 1) Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82-98. *Jurnal Wacana Publik* Vol 1 Nomor 1, Tahun 2021.
- 2) Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1-23.
- 3) Setiawati (2020). Denga Judul *Collaborative Governance* Dalam Peningkatan Hasil Produktivitas Kakao Di Kecamatan Ngapa (Universitas Muhammadiyah Makassar).

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada grand teori yang digunakan, ketiga penelitian terdahulu menggunakan teori menurut Ansell, Gash dan DeServes dengan indikator kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Sedangkan penyusun menggunakan teori menurut Schottle, et al dengan indikator ketersediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, transparansi/pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan mengambil resiko. (Hardi W, 2020:89).

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian ini untuk Mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan Pemerintah Desa Mulyasari, Petugas Pendata SDGs, dan Masyarakat. Dalam data sekunder berupa dokumen yang diperoleh dari Pemerintah Desa Mulyasari seperti hasil pendataan SDGs pada tahun 2020. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi Kepustakaan berupa pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan literature seperti Buku, Jurnal, dan Karya Tulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam Studi Lapangan berupa observasi langsung ke lapangan dan wawancara langsung dengan setiap informan. Teknik analisi data penulis menggunakan model analisis interaktif dengan langkah analisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN DISKUSI

Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai dasar permasalahan bahwa *Collaborative Governance* Dalam Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa Mulyasari Kecamatan Jat nagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020 belum optimal, untuk itu dilakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mulyasari. *Collaborative Governance* Dalam Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa Mulyasari Kecamatan Jat nagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dapat dikatakan optimal dan berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kemudian untuk dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan adalah berdasarkan dimensi-dimensi dalam teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Schöttle et al. Dalam (Warsono H, 2020:89), yaitu :

1. Kesiediaan Berkompromi
2. Komunikasi
3. Komitmen
4. Saling Percaya
5. Transparansi/Pertukaran Informasi
6. Berbagai Pengetahuan
7. Kesiediaan Mengambil Resiko

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan observasi di lapangan dan wawancara kepada setiap informan dapat disajikan berdasarkan pada indikator-indikator pertanyaan sebagai penjabaran dan dimensi sebagai berikut :

### 1. Kesiediaan Berkompromi

Berkompromi merupakan sebuah upaya untuk mendapat kesepakatan dari setiap pihak yang memiliki perbedaan pendapat atau selisih paham. Kesepakatan dan kejelasan masyarakat dalam upaya untuk memberikan data informasi yang dibutuhkan oleh petugas pendata SDGs merupakan suatu kesediaan berkompromi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Maka dari itu dengan adanya kesediaan berkompromi antar Pemerintah Desa dengan Masyarakat membuat kemudahan dalam pelaksanaan pendataan SDGs.

**a) Adanya kesepakatan dengan masyarakat dalam memberikan informasi data yang dibutuhkan petugas pendata SDGs**

Kesepakatan merupakan suatu pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Maka kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam pendataan SDGs ini harus ada dan dilaksanakan untuk mempermudah dalam proses pendataan SDGs.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa kesepakatan dengan masyarakat dalam memberikan informasi data yang dibutuhkan petugas pendata SDGs sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena masih ada masyarakat yang sangat sulit untuk mendapatkan informasi data ketika dilakukan pendataan. Sehingga membuat hasil pendataan menjadi kurang sesuai atau akurat dan menghambat dalam proses pendataan.

**b) Adanya kebenaran dan kejelasan informasi yang diberikan kepada petugas pendata guna memperoleh data SDGs**

Kebenaran adalah kebenaran data yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan. Sedangkan kejelasan yaitu jelas dalam memberikan data. Kebenaran dan kejelasan informasi data dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses pendataan SDGs. Karena dengan data yang jelas dan benar dapat membuat pelaksanaan pendataan SDGs menjadi berjalan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa kebenaran dan kejelasan informasi yang diberikan kepada petugas pendata guna memperoleh data SDGs sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena masyarakat kurang mengetahui dalam maksud dan tujuan dari pendataan SDGs. Sehingga terdapat masyarakat yang memang sulit untuk memberikan kebenaran dan kejelasan data kepada petugas pendata sehingga terdapat hasil pendataan yang kurang akurat.

**2. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain baik secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sosialisasi mengenai maksud dan tujuan dilaksanakannya pendataan *Sustainable Development Goals* harus disampaikan kepada masyarakat agar mendapatkan kemudahan dalam memperoleh data dari masyarakat. Tentunya dalam suatu Kolaborasi yang efektif tidak dapat terjadi tanpa adanya dukungan komunikasi yang baik.

**a) Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai pentingnya data SDGs**

Sosialisasi merupakan sebuah pemberian pengetahuan dan suatu keterampilan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Desa melakukan Sosialisasi kepada masyarakat berupa memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya pendataan SDGs.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai pentingnya SDGs sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari Pemerintah Desa mengenai pelaksanaan pendataan SDGs. Sehingga terdapat masyarakat yang menganggap pendataan SDGs ini tidak begitu penting dan masih kebingungan ketika dilakukan pendataan.

**b) Adanya interaksi yang dilakukan dengan masyarakat dalam melakukan pendataan SDGs**

Interaksi merupakan suatu tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bereaksi timbal balik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Pemerintah Desa berinteraksi dengan masyarakat dengan mengajak untuk bekerjasama dalam proses pendataan SDGs. Sehingga akan ada timbal balik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa interaksi yang dilakukan dengan masyarakat dalam melakukan pendataan SDGs sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa mengenai manfaat dari diadakannya pendataan SDGs. Sehingga masih terdapat masyarakat yang keras kepala dan tidak mau diajak bekerjasama dalam proses pelaksanaan pendataan SDGs.

**3. Komitmen**

Unsur utama kesuksesan kolaborasi adalah komitmen. Dibutuhkan banyak komitmen untuk bisa berkolaborasi, tetapi jika dilakukan dengan benar kolaborasi juga bisa menghasilkan komitmen bersama. Persetujuan dari masyarakat dan keseriusan dari Pemerintah Desa dalam program SDGs ini merupakan sebuah komitmen bersama yang telah dilakukan. Artinya, keberhasilan suatu kolaborasi akan dipengaruhi dengan tingkat komitmen yang dibawa oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

**a) Adanya persetujuan dari masyarakat untuk dilakukan pendataan SDGs guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan**

Persetujuan merupakan suatu pernyataan setuju atau menyetujui sesuatu. Dalam pelaksanaan pendataan SDGs persetujuan dari masyarakat sangat berpengaruh sekali terhadap proses pendataan SDGs. Maka Pemerintah Desa harus ada persetujuan dengan masyarakat supaya proses pendataan SDGs bisa berjalan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa persetujuan dari masyarakat untuk

dilakukan pendataan SDGs guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sudah pasti setuju untuk di data, tetapi ketika dilakukan pendataan tetap saja sulit untuk memperoleh data dari masyarakat tersebut. Hal tersebut juga diakibatkan oleh kurangnya ketegasan dari Pemerintah Desa kepada setiap masyarakat.

**b) Adanya keseriusan dari pihak Pemerintah Desa dan masyarakat dalam bekerja sama untuk pelaksanaan pendataan SDGs**

Keseriusan merupakan hal dimana seseorang mengerjakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Sehingga dalam pelaksanaan pendataan SDGs Pemerintah Desa, petugas pendata, dan masyarakat harus serius dalam menjalankan tugasnya. Maka dengan adanya keseriusan tersebut bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa keseriusan dari pihak Pemerintah Desa dan masyarakat dalam bekerjasama untuk pelaksanaan pendataan SDGs sudah dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Desa dan masyarakat sangat serius untuk bekerjasama supaya proses pelaksanaan pendataan SDGs berjalan sesuai yang diharapkan. Sehingga dalam

**4. Saling Percaya**

Saling percaya atau kepercayaan harus jelas dalam hubungan yakni bagaimana pekerjaan dilakukan, bagaimana kata-kata diucapkan, dan bagaimana hasilnya diperhitungkan. Sikap sungguh-sungguh dan keyakinan dari pihak Pemerintah Desa merupakan suatu sikap saling percaya yang timbul selama program pelaksanaan pendataan SDGs. Tanpa kepercayaan, kolaborasi akan berantakan dan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan.

**a) Adanya sikap sungguh-sungguh yang di miliki petugas SDGs dalam menjalankan tugas nya sebagai pendata SDGs kepada masyarakat**

Sikap bersungguh-sungguh merupakan hal yang wajib dimiliki jika ingin berhasil mencapai suatu tujuan. Dalam proses pendataan SDGs juga para petugas pendata harus memiliki sikap sungguh-sungguh agar proses pendataan SDGs berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa sikap sungguh-sungguh yang di miliki petugas SDGs dalam menjalankan tugas nya sebagai pendata SDGs kepada masyarakat sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena sering ditemukan kekosongan kuisisioner pada hasil pendataan SDGs. Hal tersebut disebabkan oleh petugas pendata yang tidak memiliki sikap bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pendata SDGs.

**b) Adanya keyakinan pihak Pemerintah Desa dalam menerima data yang telah diperoleh dari masyarakat**

Keyakinan merupakan sebuah sikap bahwa sesuatu itu benar. Maka dalam keyakinan Pemerintah Desa harus memiliki sikap yakin dalam menerima data dari



masyarakat. Dengan keyakinan yang dimiliki nantinya bisa membuat sebuah proses berjalan sesuai yang di harapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa keyakinan pihak pemerintah desa dalam menerima data yang telah diperoleh dari masyarakat sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat sebagian masyarakat yang memberikan datanya tidak sesuai dengan fakta. Sehingga membuat pihak Pemerintah Desa dan petugas pendata tidak yakin terhadap data yang diperoleh dari hasil pendataan tersebut.

## **5. Transparansi/Pertukaran Informasi**

Transparansi atau pertukaran informasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Sikap saling terbuka dan kejelasan mengenai maksud tujuannya dilakukan nya pendataan SDGs merupakan sebuah transparansi yang dilakukan selama pendataan SDGs. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam kolaborasi, akan meningkatkan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan sehingga kontrol terhadap para pemegang otoritas akan berjalan efektif.

### **a) Adanya sikap saling terbuka dalam memberikan informasi berkaitan dengan pendataan SDGs**

Saling terbuka merupakan kebebasan untuk saling berbagi pikiran dan informasi. Dalam pendataan SDGs sikap saling terbuka sangat penting. Karena jika tidak saling terbuka ketika dilakukan pendataan tidak akan mendapatkan data yang akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa sikap saling terbuka dalam memberikan informasi berkaitan dengan pendataan SDGs sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat masyarakat yang sulit diajak untuk saling terbuka dalam proses pendataan SDGs, sehingga membuat kesulitan dalam memperoleh data yang benar dan akurat dari masyarakat.

### **b) Adanya kejelasan mengenai maksud dan tujuan dilakukan pendataan SDGs ini kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui tujuan pendataan SDGs**

Kejelasan Pemerintah Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan pendataan SDGs. Tentunya maksud dan tujuannya pendataan SDGs ini sangat banyak, tetapi hal paling utama yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa kejelasan mengenai maksud dan tujuan dilakukan pendataan SDGs ini kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui tujuan pendataan SDGs sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena masih ada masyarakat yang belum mengerti mengenai maksud dan tujuan dilakukan pendataan SDGs sehingga membuat

kesulitan ketika dilakukan pendataan. Dan terlihat masyarakat Desa Mulyasari kurang dalam menangkap informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

## **6. Berbagi Pengetahuan**

Berbagi pengetahuan dalam sebuah kolaborasi dapat membantu meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan. Sikap berbagi pemahaman antara Pemerintah Desa dengan petugas pendata SDGs dan memberikan sebuah pengertian dari Pemerintah Desa kepada masyarakat selama berjalannya pelaksanaan pendataan SDGs. Kolaborasi akan mampu memberikan jawaban lebih cepat atau mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

### **a) Adanya sikap berbagi pemahaman berkenaan dengan apa itu SDGs oleh pihak Pemerintah Desa**

Berbagi pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu. Pemerintah Desa harus memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai SDGs, sehingga masyarakat dapat mengerti atau memahami mengenai SDGs.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa sikap berbagi pemahaman berkenaan dengan apa itu SDGs oleh pihak Pemerintah Desa sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena masih ada masyarakat yang kurang paham mengenai dengan apa itu SDGs dan lemahnya masyarakat dalam menangkap penjelasan yang telah diberikan, sehingga dapat mempersulit dalam proses pendataan.

### **b) Adanya pihak Pemerintah Desa memberi pengertian bahwa pendataan SDGs ini merupakan tanggung jawab bersama**

Memberi Pengertian merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu atau dapat mengerti sesuatu hal. Pemerintah Desa harus bisa memberikan sebuah pengertian kepada masyarakat supaya bisa memahami dan mengerti bahwa pendataan SDGs ini sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa pihak Pemerintah Desa memberi pengertian bahwa pendataan SDGs ini merupakan tanggung jawab bersama sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena kesulitan untuk memperoleh data dari masyarakat dan masyarakat tersebut seolah-olah tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan pendataan SDGs. Padahal sudah jelas bahwa pendataan SDGs ini merupakan tanggung jawab bersama.

## **7. Kesiediaan Mengambil Resiko**

Dalam berkolaborasi, menghadapi risiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi serta merupakan bagian penting. Sikap tanggung jawab dari Pemerintah Desa dengan petugas pendata dan tindakan yang diambil ketika menemukan suatu permasalahan selama pelaksanaan pendataan SDGs. Dengan kesiediaan mengambil resiko tentunya akan membuat pelaksanaan pendataan SDGs ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

**a) Adanya sikap tanggung jawab yang di miliki oleh Pemerintah Desa dengan Petugas SDGs apabila ketika dalam pendataan SDGs terdapat ada kesalahan seperti ketidak akuratan data dalam pendataan**

Sikap tanggung jawab merupakan suatu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu dan menanggung akibatnya. Sama halnya dalam pendataan SDGs, ketika dalam pelaksanaan pendataan menemukan sebuah masalah maka Pemerintah Desa harus siap bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa sikap tanggung jawab yang di miliki oleh Pemerintah Desa dengan Petugas SDGs apabila ketika dalam pendataan SDGs terdapat ada kesalahan seperti ketidak akuratan data dalam pendataan sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena terdapat petugas pendata yang baru ikut serta dalam pendataan dan masih minimnya pengalaman yang dimiliki. Sehingga sering terdapat ditemukan kesalahan dalam hasil pendataan, dimana terdapat data yang tidak akurat yang dapat mempersulit dalam proses entry data.

**b) Adanya tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dengan petugas SDGs ketika terdapat kesulitan selama pelaksanaan pendataan SDGs**

Tindakan merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk menghadapi suatu permasalahan. Sehingga dalam proses pendataan SDGs juga Pemerintah Desa dan petugas pendata harus bisa melakukan tindakan jika menemukan kesulitan selama pelaksanaan pendataan SDGs.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti menganalisis bahwa tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dengan petugas SDGs ketika terdapat kesulitan selama pelaksanaan pendataan SDGs sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena meskipun sudah dilakukan tindakan, masih ada masyarakat yang memang bersikeras untuk sulit memberikan informasi data nya kepada petugas pendata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* Dalam Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa Mulyasari Kecamatan Jat nagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Secara keseluruhan sudah dilakukan sesuai dengan keberhasilan *Collaborative* menurut Schöttle et al. yang dikutip oleh Hardi W, (2020:89) namun belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui hambatan-hambatan. Hal ini dapat dilihat dari tujuh dimensinya yaitu kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, transparansi atau pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan mengambil resiko.

Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan *Collaborative* masih menghadapi hambatan dalam kebenaran data yang belum akurat, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa, kurangnya transparansi mengenai program SDGs, pemahaman yang kurang dari masyarakat, dan tanggung jawab dari petugas pendata yang masih rendah. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebaiknya Pemerintah Desa

melakukan seleksi petugas pendata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, Pemerintah Desa bisa lebih mempersiapkan kembali dalam program SDGs, tingkatkan dalam sosialisasi dan transparansi mengenai program SDGs, petugas pendata harus lebih tegas dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas nya, dan tingkatkan dalam partisipasi masyarakat dengan mampu untuk diajak bekerjasama dalam proses pendataan SDGs.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfa, Akbar. 2019. Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun, Jurnal Kebijakan pembangunan Derah, 05 (02): 2016-2021.
- Fitrah, M. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Haboddin, M. (2015). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Universitas Brawijaya Press
- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Iskandar, Abdul Halim. 2020. SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia.
- Mutiawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 1(1), 82-98.
- Nawir, A., Syamsuddin, S., & Jusniaty, J. (2021). Penerapan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan. Demokrasi, 1(3), 1-18.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Rahmadhani, S., & Alkadafi, M. (2022). Kinerja Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu. Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS), 1(02), 97-114.
- Sa'adah, R. N. (2021). Metode Penelitian R&D (*Research and Development*) Kajian Teoretis dan Aplikatif. CV Literasi Nusantara Abadi.

- Samsara, L. Jejaring kerja dan Kolaborasi Pembangunan AntarDesa: Sebuah Terobosan untuk menciptakan pembangunan kawasan Perdesaan yang Terintegrasi *Intergovernmental Development Network and Collaboration: A Breakthrough to Create Integrated Rural Development*.
- Samsu, S. (2017). Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development).
- Suci Rahmadhani, S. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pendataan Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wekke, Ismail Suardi. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gawe Buku.
- Yasinta, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1-23.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*.